



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

TAHUN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.



Mempawah, 21 Agustus 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
Kabupaten Mempawah



Dra. IRRAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720510 199203 2 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	42
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada)	43
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jika ada)	45
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (jika ada)	46
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	47
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	47
2.2.2 Isu Strategis	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
KEBIJAKAN.....	58
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	58
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	68
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	74
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	118
BAB V PENUTUP	120
5.1 Kesimpulan.....	120
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	120
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah.....	24
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah.....	33
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan	43
Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah	44
Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (jika ada).....	45
Tabel 2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	47
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	48
Tabel 2.9 Perumusan Isu Perangkat Daerah.....	54
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	60
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	68
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	69
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	70
Tabel 3.5 Lokus Permasalahan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	71
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	75
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah.....	90
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	116
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	118
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah..... 21

Gambar 3.2 Pohon Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah..... 69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi:

persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Mempawah, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mempawah, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.1106), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang;



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025;
27. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemberian Pelayanan;
- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja



penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah. Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan di bidang Keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah menjalankan fungsi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang Keuangan dan Aset;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Aset;
- g. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Keuangan dan Aset;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Keuangan dan Aset sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, memiliki tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang Keuangan dan Aset;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang Keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang Keuangan dan Aset;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Keuangan dan Aset;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Keuangan dan Aset;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;

- j. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Keuangan dan Aset;
- k. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan serta pengelolaan pelayanan publik;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan; h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangundangan.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan serta melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan badan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Badan;
- c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
- e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- i. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;

- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Anggaran dan Penatausahaan

Kepala Bidang Anggaran dan Penatausahaan mempunyai tugas Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Anggaran dan Penatausahaan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Anggaran dan Penatausahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Anggaran dan Penatausahaan menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Anggaran dan Penatausahaan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah di Bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Penatausahaan;

- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Anggaran dan Penatausahaan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan

Sub Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang anggaran dan penatausahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan.
- c. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah;
- e. Pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;

- h. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Penatausahaan.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penatausahaan II

Sub Bidang Penatausahaan II mempunyai tugas pokok pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang Penatausahaan II sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Penatausahaan II menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Penatausahaan II;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penatausahaan II;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Penatausahaan II;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penatausahaan II;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Penatausahaan II;
- f. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Penatausahaan II; h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Penatausahaan II;
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang Penatausahaan II yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Penatausahaan.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Akuntansi, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan

administrasi di bidang Akuntansi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Akuntansi menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Akuntansi;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Akuntansi;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Akuntansi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah di Bidang Akuntansi;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Akuntansi;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Akuntansi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran

Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas pokok tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang Akuntansi Pengeluaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Akuntansi Pengeluaran;

- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi Pengeluaran;
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- g. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang Akuntansi Pengeluaran yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi.

2.1.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Akuntansi Pelaporan

Sub Bidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas pokok tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang Akuntansi Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Akuntansi Pelaporan menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Akuntansi Pelaporan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi Pelaporan;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Akuntansi Pelaporan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan daerah;
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi Pelaporan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Akuntansi Pelaporan;

- g. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Akuntansi Pelaporan;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Akuntansi Pelaporan;
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang Akuntansi Pelaporan yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi.

2.1.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Aset, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Aset. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Aset menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Aset;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Aset;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Aset;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan program pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Aset;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Aset;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Aset sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Aset;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Aset;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Aset sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.1.11 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi

Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi mempunyai tugas pokok tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- d. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- f. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset.

2.1.1.12 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan

Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;

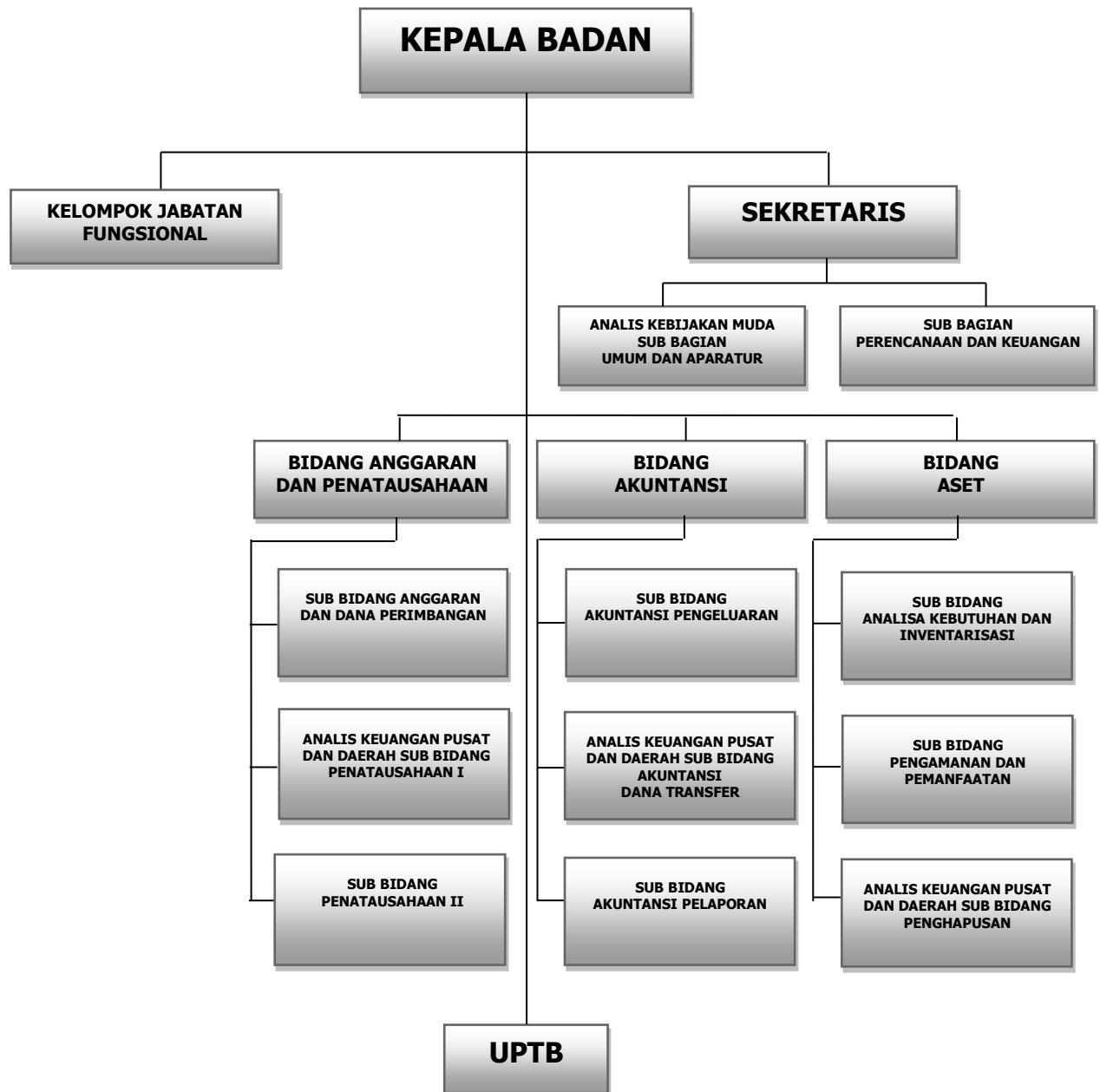


- c. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- d. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- f. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah, disajikan pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mempawah



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah** memiliki 54 (lima puluh empat) pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Eselon II | : 1 Orang |
| 2. Eselon III | : 3 Orang |
| 3. Eselon IV | : 7 Orang |
| 4. Pejabat fungsional | : 36 Orang |
| 5. PPPK | : 7 Orang |

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi ideal. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan,

serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 54 orang dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Magister S-2 : 7 Orang
2. Sarjana S-1 : 33 Orang
3. Diploma 3 : 5 Orang
4. SMA Sederajat : 9 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang Sarjana S-1, yang mencerminkan kesiapan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 6 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 11 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 25 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 12 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia 40-49 tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini menunjukkan regenerasi yang baik / mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai / menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Tanah	4	-	4
2	Stationary Generating Set	1	-	1
3	Pompa Air	2	-	2
4	Mini Bus	3	-	3
5	Pick Up	1	-	1
6	Sepeda Motor	22	4	26
7	Alat pemeliharaan tanaman	1	-	1
8	Mesin Fotocopy Folio	1	-	1
9	Lemari Besi/Metal	6	-	6
10	Lemari Kayu	14	-	14
11	Rak Besi	6	-	6
12	Filing Cabinet Besi	9	-	9
13	Brandkas	6	-	6
14	Lemari Kaca	1	-	1
15	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1	-	1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
16	Mesin Absensi	1	-	1
17	LCD Projector/Infocus	3	-	3
18	Papan Nama Instansi	1	-	1
19	Papan Pengumuman	4	-	4
20	Alat Kantor Lainnya	53	-	53
21	Meja rapat	31	-	31
22	Meja bundar	6	-	6
23	Meja Makan Besi	1	-	1
24	Kursi Tamu	1	-	1
25	Mesin Pel/Poles	1	-	1
26	Mesin Pemotong Rumput	1	-	1
27	Lemari Es	1	-	1
28	A.C. Window	5	-	5
29	A.C. Split	12	-	12
30	Exhause Fan	1	-	1
31	Rice Cooker (Alat Dapur)	5	-	5
32	Alat Dapur lainnya	1	-	1
33	Televisi	1	-	1
34	Amplifier	1	-	1
35	Mic Conference	2	-	2
36	Unit Power Supply	7	-	7
37	Tangga Aluminium	2	-	2
38	Karpet	4	-	4
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	-	4
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
41	Meja Rapat Pejabat Eselon II	7	-	7
42	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	-	1
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1
45	Camera Electronic	1	-	1
46	Layar Film/Projector	1	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
47	Facsimile	1	-	1
48	Alat komunikasi sosial lainnya	1	-	1
49	Mainframe (Komputer Jaringan)	6	-	6
50	Komputer Jaringan lainnya	1	-	1
51	P.C Unit	31	-	31
52	Lap Top	15	-	15
53	Note Book	1	-	1
54	Personal Komputer lainnya	1	-	1
55	Komputer Unit Lainnya	1	-	1
56	CPU (Peralatan Mini Komputer)	4	-	4
57	CPU (Peralatan Personal Komputer)	4	-	4
58	Monitor	4	-	4
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43	-	43
60	Peralatan Personal Komputer lainnya	8	-	8
61	Tenda	2	-	2

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi layak guna, hanya ada beberapa kerusakan fisik, disebabkan usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Mempawah yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelerasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah. Kinerja keuangan Kabupaten Mempawah ditampilkan untuk menjelaskan kinerja keuangan periode tahun 2020–2024.

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas. Berikut adalah penjelasan prinsip-prinsip pelayanan yang diterapkan oleh BPKAD:

1. Transparansi
 - a. Informasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah disampaikan secara terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan.
 - b. Memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran, laporan keuangan, aset daerah, dan proses pengadaan.
2. Akuntabilitas
 - a. Mengelola sumber daya keuangan dan aset dengan cara yang paling optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
 - b. Meminimalkan pemborosan anggaran serta memastikan aset digunakan untuk kepentingan publik secara maksimal.



3. Efisiensi dan Efektivitas
 - a. Mengelola sumber daya keuangan dan aset dengan cara yang paling optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
 - b. Meminimalkan pemborosan anggaran serta memastikan aset digunakan untuk kepentingan publik secara maksimal.
4. Kepastian Hukum
 - a. Setiap proses pengelolaan keuangan dan aset dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menjamin bahwa seluruh prosedur, mulai dari perencanaan anggaran hingga pengelolaan aset, sesuai dengan ketentuan hukum.
5. Profesionalisme
 - a. Petugas BPKAD dituntut memiliki kompetensi, integritas, dan etika kerja yang tinggi.
 - b. Mengedepankan pelayanan berbasis kinerja dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas
6. Partisipasi
 - a. Melibatkan pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah maupun masyarakat, dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan daerah.
 - b. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset.
7. Keadilan dan Non-Diskriminasi
 - a. Pelayanan yang diberikan oleh BPKAD tidak boleh memihak dan harus adil bagi seluruh pihak.
 - b. Menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan keuangan dan aset.
8. Responsivitas
 - a. Cepat tanggap dalam melayani kebutuhan pemangku kepentingan terkait informasi keuangan dan pengelolaan aset.
 - b. Menangani pengaduan, permintaan data, atau layanan lainnya secara cepat dan tepat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah**

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)															
	- Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	100%					100%					100%				
	- Persentase SiLPA terhadap APBD	6%					6%					6%				
	- Persentase penerbitan penerbitan SP2D tepat waktu	100%					100%					100%				
	- Persentase aset daerah yang terinventarisasi dalam aplikasi	100%					100%					100%				
	- Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP					WTP					WTP				
	- Persentase ketepatan waktu penetapan APBD		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
	- Persentase penerbitan penerbitan SP2D tepat waktu		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
	- Persentase ketepatan dan kesesuaian waktu penyajian laporan keuangan daerah		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
	- Persentase aset daerah yang terinventarisasi dalam aplikasi		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)															
	- Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	29,54%	14,62%	32,86%	16,53%	10,87%	29,54%	14,62%	32,86%	16,53%	10,87%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	67,34%	68,21%	68,44%	67,79%	62,19%	67,34%	68,21%	68,44%	67,79%	62,19%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Opini Laporan keuangan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
	- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	87,91%	90,20%	12,46%	3,95%	4,85%	87,91%	90,20%	12,46%	3,95%	4,85%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Manajemen Aset	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
	- Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,75	8,62	11,32	10,61	3,19	5,75	8,62	11,32	10,61	3,19	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah pada tahun 2020 masih menggunakan indikator kinerja yang mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006, sedangkan capaian kinerja pelayanan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 sudah menggunakan Permendagri 90 Tahun 2019, jika dilihat dari hasil capaian pada indikator kinerja tahun 2020 yaitu Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, Persentase SiLPA terhadap APBD, Persentase penerbitan penerbitan SP2D tepat waktu dan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah untuk 1 tahun masa Renstra menunjukkan hasil yang baik. Untuk capaian indikator kinerja yang telah menggunakan Permendagri 90 Tahun 2019 mulai tahun 2021 s.d 2024 yaitu Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, Persentase penerbitan penerbitan SP2D tepat waktu, Persentase ketepatan dan kesesuaian waktu penyajian laporan keuangan daerah dan Persentase aset daerah yang terinventarisasi dalam aplikasi selama 4 tahun masa Renstra juga menunjukkan hasil yang baik. Hal ini disebabkan Sistem informasi pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, walaupun dalam pelaksanaannya kadang kala masih ditemukan permasalahan-permasalahan namun dapat cepat diatasi.

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan output yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi



sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah**

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Permendagri 13 Tahun 2006																
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.146.095.300	-	-	-	-	1.407.572.828					65,59				
15 01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	152.049.600					-	-	-	-	-	-				
15 06	Penyusunan Rancangan Perda ttg APBD	112.710.000					76.347.500	-	-	-	-	67,74				
15 07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	310.098.000					170.361.650	-	-	-	-	54,94				
15 08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	117.710.000					82.141.500	-	-	-	-	69,78				
15 09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	309.272.000					289.803.551	-	-	-	-	93,71				
15 14	Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	82.654.000					-	-	-	-	-	-				
15 30	Penyusunan KUA dan PPAS	99.889.100					99.449.800	-	-	-	-	99,56				
15 31	Dukungan Penyediaan Kelengkapan Pengelolaan Penggajian	225.675.000					148.890.038	-	-	-	-	65,98				
15 32	Dukungan Penyediaan Kelengkapan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan	252.957.600					181.260.289	-	-	-	-	71,66				
15 44	Dukungan dan Penyediaan Kelengkapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)	241.500.000					314.435.000	-	-	-	-	130,20				
15 47	Dukungan Pengelolaan Bantuan Keuangan	60.000.000					44.883.500	-	-	-	-	74,81				
15 58	Bimbingan teknis manajemen pengelolaan keuangan daerah	181.580.000					-	-	-	-	-	-				
Permendagri 90 Tahun 2019																
02.	Pengelolaan Keuangan Daerah		148.443.047.074	139.057.171.836	141.088.420.916	137.026.076.700	-	134.292.403.614	131.923.122.388	131.000.055.338	138.064.600.412		90,47	94,87	92,85	100,76
02.2.01	- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		848.898.725	854.424.775	893.584.000	1.255.501.900	-	843.483.885	850.713.800	881.952.850	920.234.880		99,36	99,57	98,70	73,30
02.2.01 01	- Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS		75.993.825	72.383.825	96.258.600	145.086.250		74.899.325	72.377.000	94.578.115	137.318.365		98,56	99,99	98,25	94,65
02.2.01 02	- Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS		60.434.775	52.359.525	46.579.300	102.594.550		60.274.525	52.335.400	45.105.420	93.844.655		99,73	99,95	96,84	91,47
02.2.01 03	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD		72.418.300	44.018.300	79.961.900	118.204.100		72.418.300	44.018.150	77.563.850	93.844.655,00		100,00	100,00	97,00	79,39
02.2.01 04	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA SKPD		3.467.000	3.467.000	3.357.300	84.808.700		3.467.000	3.467.000	3.315.600	93.119.100,00		100,00	100,00	98,76	109,80
02.2.01 05	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD		24.004.000	24.004.000	23.996.700	40.182.400		21.384.000	24.003.900	23.994.800	32.991.650,00		89,09	100,00	99,99	82,10



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
02.2.01 06	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA SKPD		4.959.600	22.939.600	30.849.100	79.579.700		4.709.925	19.639.600	30.845.700	40.162.600,00		94,97	85,61	99,99	50,47
02.2.01 07	- Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD		300.761.900	277.708.175	262.601.900	248.094.300		300.001.785	277.591.800	261.123.370	30.369.700,00		99,75	99,96	99,44	12,24
02.2.01 08	- Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD		297.178.200	357.544.350	300.653.100	353.731.250		296.648.125	357.280.950	296.367.515	318.727.815,00		99,82	99,93	98,57	90,10
02.2.01 09	- Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran		9.681.125	-	49.326.100	83.220.650		9.680.900	-	49.058.480	79.856.340,00		100,00	#DIV/0!	99,46	95,96
02.2.01	- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		240.031.625	249.000.000	373.739.000	492.800.000	-	212.411.333	245.107.718	367.607.835	531.597.206		88,49	98,44	98,36	107,87
02.2.01 01	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		-	8.000.000	12.211.000	15.000.000		-	7.999.700	11.881.207	13.380.870,00		#DIV/0!	100,00	97,30	89,21
02.2.01 03	- Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		13.744.275	13.000.000	13.000.000	16.000.000		13.744.275	11.999.800	12.998.089	14.722.090,00		100,00	92,31	99,99	92,01
02.2.01 05	- Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		-	75.000.000	79.000.000	78.600.000		-	73.619.118	77.173.616	83.995.025,00		#DIV/0!	98,16	97,69	106,86
02.2.01 06	- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank		-	8.000.000	5.960.000	14.000.000		-	7.999.700	5.945.629	13.512.800,00		#DIV/0!	100,00	99,76	96,52
02.2.01 07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		94.589.900	65.000.000	85.950.000	110.000.000		81.034.633	63.679.800	82.551.142	116.924.955,00		85,67	97,97	96,05	106,30
02.2.01 09	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		124.050.000	70.000.000	167.618.000	227.400.000		113.384.975	69.809.750	167.104.703	266.588.784,00		91,40	99,73	99,69	117,23
02.2.01 10	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		7.647.450	10.000.000	10.000.000	15.000.000		4.247.450	9.999.850	9.953.449	14.496.682,00		55,54	100,00	99,53	96,64
02.2.01 11	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		-	-	-	16.800.000		-	-	-	7.976.000,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	47,48
02.2.04	- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		147.156.116.724	137.573.897.061	139.499.320.316	134.779.774.800	-	133.038.508.396	130.470.494.620	129.440.490.432	136.176.376.815		90,41	94,84	92,79	101,04
02.2.04 08	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		125.405.929.700	117.529.846.300	123.495.505.726	122.417.024.800		125.327.351.500	117.529.496.000	120.496.789.500	126.310.116.865,00		99,94	100,00	97,57	103,18
02.2.04 09	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		16.689.372.024	10.971.661.761	7.450.167.590	5.000.000.000		3.931.587.896	4.394.420.620	2.317.401.932	1.229.588.950,00		23,56	40,05	31,11	24,59
02.2.04 10	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		5.060.815.000	9.072.389.000	8.553.647.000	7.362.750.000		3.779.569.000	8.546.578.000	6.626.299.000	8.636.671.000,00		74,68	94,20	77,47	117,30
02.2.05	- Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		198.000.000	379.850.000	321.777.600	498.000.000	-	198.000.000	356.806.250	310.004.221	436.391.511		100,00	93,93	96,34	87,63
02.2.05 02	- Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah		198.000.000	379.850.000	321.777.600	498.000.000		198.000.000	356.806.250	310.004.221	436.391.511,00		100,00	93,93	96,34	87,63



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Permendagri 13 Tahun 2006																
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	237.428.600	-	-	-	-	185.071.050					77,95				
15 10	Penyusunan Raperda ttg Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	34.930.600					33.742.100	-	-	-	-	96,60				
15 11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	202.498.000					151.328.950	-	-	-	-	74,73				
16	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan	936.674.000	-	-	-	-						-				
16 06	Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran	40.999.000					41.897.600	-	-	-	-	102,19				
16 07	Penyusunan Laporan Konsolidasi Pengelolaan Keuangan Daerah	325.785.000					192.895.450	-	-	-	-	59,21				
16 09	Pembinaan akuntansi pertanggung jawaban belanja dan pelaporan keuangan SKPD	19.000.000					-	-	-	-	-	-				
16 12	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	55.250.000					34.866.084	-	-	-	-	63,11				
16 13	Pembinaan Akuntansi, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Transfer	162.500.000					120.122.548	-	-	-	-	73,92				
16	Rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban Pendapatan SKPD dan PPKD	85.000.000					-	-	-	-	-	-				
16	Penyusunan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah (IKPD)	19.140.000					-	-	-	-	-	-				
16	Rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD	129.000.000					-	-	-	-	-	-				
16	Sosialisasi kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	55.000.000					-	-	-	-	-	-				
16	Pronogsis penyusunan laporan keuangan semester I Pemerintah Daerah	45.000.000					-	-	-	-	-	-				
Permendagri 90 Tahun 2019																
02.	Pengelolaan Keuangan Daerah		503.009.400	492.708.998	560.043.328	674.966.178		502.504.048	484.117.681	555.961.557	687.262.597		99,90	98,26	99,27	101,82
02.2.03	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		503.009.400	492.708.998	560.043.328	674.966.178		502.504.048	484.117.681	555.961.557	687.262.597		99,90	98,26	99,27	101,82
02.2.03 01	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		-	15.000.000	11.000.000	15.000.000		-	14.960.000	10.998.100	21.371.200,00		#DIV/0!	99,73	99,98	142,47
02.2.03 02	- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		142.170.550	131.770.498	147.109.128	160.103.978		142.109.698	131.580.348	146.784.216	169.877.167,00		99,96	99,86	99,78	106,10
02.2.03 03	- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		-	15.000.000	6.868.000	39.963.200		-	14.760.000	6.703.850	38.989.480,00		#DIV/0!	98,40	97,61	97,56
02.2.03 04	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		170.445.850	175.545.500	226.000.000	249.899.200		170.348.350	175.118.658	224.695.618	248.613.020,00		99,94	99,76	99,42	99,49



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
02.2.03 05	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		170.393.000	145.393.000	155.426.200	180.000.000		170.056.000	137.818.675	154.429.753	178.600.520,00		99,80	94,79	99,36	99,22
02.2.03 06	- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		-	-	-	-		-					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
02.2.03 08	- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		-	-	-	-		-					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
02.2.03 09	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		-	-	-	-		-					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
02.2.03 10	- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		-	-	-	-		-					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
02.2.03 11	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		20.000.000	10.000.000	13.640.000	29.999.800		19.990.000	9.880.000	12.350.020	29.811.210,00		99,95	98,80	90,54	99,37
02.2.03 12	- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		-	-	-	-		-					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Permendagri 13 Tahun 2006																
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.224.105.300	-	-	-	-	696.822.771					56,93				
15 02	Penyusunan Standar Satuan Harga	284.971.000										-				
15 16	Peningkatan Manjeman Aset / Barang Daerah	477.393.100					406.040.271	-	-	-	-	85,05				
15 35	Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Pemeliharaan BMD	34.710.200					30.048.500	-	-	-		86,57				
15 51	Pengamanan Barang Milik Daerah	132.861.000					75.833.600	-	-	-		57,08				
15 56	Penghapusan dan Bouw Valliq Bangunan milik Pemerintah Kab. Mempawah	132.218.500					183.575.400	-	-	-	-	138,84				
15 61	Penyusunan Data Base Aset Daerah	62.988.000					1.325.000	-	-	-	-	2,10				
15 66	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Daerah	98.963.500										-				
Permendagri 90 Tahun 2019																
03	Pengelolaan Barang Milik Daerah		678.002.480	966.135.150	914.059.046	1.208.388.606	-	664.651.971	921.906.287	885.404.713	1.118.647.377		98,03	95,42	96,87	92,57
03.2.01	- Pengelolaan Barang Milik Daerah		678.002.480	966.135.150	914.059.046	1.208.388.606	-	664.651.971	921.906.287	885.404.713	1.118.647.377		98,03	95,42	96,87	92,57
03.2.01 01	- Penyusunan Standar Satuan Harga		92.936.000	192.569.925	186.269.800	240.359.550		90.505.975	192.004.600	183.262.100	207.491.200		97,39	99,71	98,39	86,33
03.2.01 02	- Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		-	-	-	-		-	-							
03.2.01 03	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		19.661.290	18.636.075	29.207.800	30.762.700		17.891.175	17.285.900	25.874.800	24.643.450,00		91,00	92,76	88,59	80,11



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
03.2.01 04	- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	-	-	-		-	-							
03.2.01 05	- Penatausahaan Barang Milik Daerah		250.000.000	347.598.300	388.770.796	346.453.256		248.325.696	332.156.387	382.802.586	434.265.548,00		99,33	95,56	98,46	125,35
03.2.01 06	- Inventarisasi Barang Milik Daerah		-	-	-	-		-	-							
03.2.01 07	- Pengamanan Barang Milik Daerah		41.147.700	79.117.700	53.941.200	85.608.850		40.932.200	78.357.650	51.320.550	102.524.161,00		99,48	99,04	95,14	119,76
03.2.01 08	- Penilaian Barang Milik Daerah		1.790.000	119.867.700	65.902.450	104.279.150		1.790.000	97.577.700	59.701.437	68.185.365,00		100,00	81,40	90,59	65,39
03.2.01 09	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang		24.895.000	-	-	90.000.000		23.615.000	-				94,86	#DIV/0!	#DIV/0!	-
03.2.01 10	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		111.140.350	107.797.100	58.336.700	100.000.000		110.635.250	105.116.700	56.186.485	93.222.538,00		99,55	97,51	96,31	93,22
03.2.01 11	- Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah		59.861.640	59.861.450	70.011.300	134.116.550		58.356.425	58.721.450	67.536.630	121.784.920,00		97,49	98,10	96,47	90,81
03.2.01 12	- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		24.321.500	40.686.900	61.619.000	76.808.550		24.111.250	40.685.900	58.720.125	66.530.195,00		99,14	100,00	95,30	86,62
03.2.01 13	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		52.249.000	-	-	-		48.489.000	-				92,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Permendagri 13 Tahun 2006																
06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		30.000.000					29.914.800					99,72				
06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							14.959.500	-	-	-	-	#VALUE!				
06 05 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD		30.000.000					14.955.300	-	-	-	-	49,85				
Permendagri 90 Tahun 2019																
01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.999.200	-	29.990.000	29.968.500	29.751.896	28.966.438		99,97	99,90	99,17	96,56
01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.999.200	-	29.990.000	29.968.500	29.751.896	28.966.438		99,97	99,90	99,17	96,56
01.2.01 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	4.999.750	4.840.850	4.877.600		100,00	100,00	96,82	97,55
01.2.01 02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	2.999.800	2.972.645	2.805.332		100,00	99,99	99,09	93,51
01.2.01 03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.999.700		2.000.000	1.999.700	1.996.160	1.801.948		100,00	99,99	99,81	90,11
01.2.01 04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	2.999.800	2.971.845	2.802.702		100,00	99,99	99,06	93,42
01.2.01 05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.999.700		2.000.000	1.999.700	1.996.160	1.792.448		100,00	99,99	99,81	89,64
01.2.01 06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.999.800		14.990.000	14.969.750	14.974.236	14.886.408		99,93	99,80	99,83	99,24
Permendagri 13 Tahun 2006																
06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		27.500.000					27.476.800					99,92				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
06 02	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	5.000.000					4.987.300	-	-	-	-	99,75				
06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	22.500.000					22.489.500	-	-	-	-	99,95				
Permendagri 90 Tahun 2019																
01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5.141.686.385	4.917.977.998	5.022.244.290	6.030.810.795	-	4.682.475.196	4.769.738.179	4.832.284.469	5.388.399.553		91,07	96,99	96,22	89,35
01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.141.686.385	4.917.977.998	5.001.344.290	6.009.910.795	-	4.682.475.196	4.769.738.179	4.811.742.139	5.367.822.983		91,07	96,99	96,21	89,32
01.2.02 01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.094.186.385	4.870.477.998	4.909.924.290	5.918.491.595		4.635.185.296	4.722.238.779	4.721.324.585	5.277.393.994		90,99	96,96	96,16	89,17
01.2.02 03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12.500.000	12.500.000	56.420.000	56.419.650		12.499.900	12.499.800	55.706.150	56.373.120		100,00	100,00	98,73	99,92
01.2.02 05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.499.850		27.290.000	27.499.800	27.220.659	26.732.995		99,24	100,00	98,98	97,21
01.2.02 07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.499.700		7.500.000	7.499.800	7.490.745	7.322.874		100,00	100,00	99,88	97,64
01.2.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	20.900.000	20.900.000	-	-	-	20.542.330	20.576.570		#DIV/0!	#DIV/0!	98,29	98,45
01.2.03 01	- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		-	-	20.900.000	20.900.000		-	-	20.542.330	20.576.570		#DIV/0!	#DIV/0!	98,29	98,45
Permendagri 13 Tahun 2006																
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.860.000					27.845.000					84,74				
03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	32.860.000					27.845.000	-	-	-	-	84,74				
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	70.000.000					19.426.952					27,75				
05 02	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	70.000.000					19.426.952	-	-	-	-	27,75				
Permendagri 90 Tahun 2019																
01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		37.443.000	69.400.800	50.000.000	57.443.000	-	33.243.400	61.364.600	49.468.000	24.298.663		88,78	88,42	98,94	42,30
01.2.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		37.443.000	69.400.800	50.000.000	57.443.000	-	33.243.400	61.364.600	49.468.000	24.298.663		88,78	88,42	98,94	42,30
01.2.05 02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		32.443.000	29.400.800	-	32.443.000		28.253.400	26.811.600	-			87,09	91,19	#DIV/0!	-
01.2.05 10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		5.000.000	40.000.000	50.000.000	25.000.000		4.990.000	34.553.000	49.468.000	24.298.663		99,80	86,38	98,94	97,19
Permendagri 13 Tahun 2006																
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	319.000.000					534.844.205					167,66				
01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000					1.658.000	-	-	-	-	33,16				
01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.500.000					247.092.949	-	-	-	-	9.883,72				
01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ops	13.000.000					8.126.900	-	-	-	-	62,51				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.500.000					2.250.000	-	-	-	-	50,00				
01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	6.100.000					73.488.088	-	-	-	-	1.204,72				
01 10	Penyediaan Alat tulis kantor	28.000.000					27.992.600	-	-	-	-	99,97				
01 11	Penyediaan Bahan cetakan dan Penggandaan	52.000.000					41.993.400	-	-	-	-	80,76				
01 12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	12.000.000					17.625.000	-	-	-	-	146,88				
01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	2.500.000					-	-	-	-	-	-				
01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	36.000.000					20.880.000	-	-	-	-	58,00				
01 18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	130.000.000					54.912.268	-	-	-	-	42,24				
01 19	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah	25.000.000					14.825.000	-	-	-	-	59,30				
01 21	Penyediaan Jasa Pendukung keamanan dan ketertiban /pengamanan kantor	2.400.000					24.000.000	-	-	-	-	1.000,00				
16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	35.081.300										-				
16 02	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	35.081.300					35.080.300	-	-	-	-	100,00				
18	Program Kerjasama Pameran Informasi dan Media Massa	20.000.000										-				
18 04	Dukungan Pameran Informasi Pelayanan Publik	20.000.000					-	-	-	-	-	-				
Permendagri 90 Tahun 2019																
01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		584.942.700	627.498.686	678.790.768	597.040.450		556.765.307	587.285.487	645.959.672	669.511.438		95,18	93,59	95,16	112,14
01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah		238.042.700	250.638.150	268.366.700	257.780.450		232.247.225	246.554.408	251.391.547	306.512.781		97,57	96,37	93,67	118,90
01.2.06 01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.993.500	28.542.800	27.828.300	27.828.300		15.967.500	28.542.800	27.743.000	27.747.850		99,84	100,00	99,69	99,71
01.2.06 02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		78.804.800	59.252.000	54.538.400	59.254.300		78.486.300	59.252.000	50.648.400	58.151.500		99,60	100,00	92,87	98,14
01.2.06 04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		30.000.000	39.600.000	36.000.000	36.000.000		26.640.000	36.000.000	25.749.380	23.541.000		88,80	90,91	71,53	65,39
01.2.06 05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		71.998.800	51.997.750	30.000.000	34.999.700		70.991.425	51.997.450	29.516.860	33.571.400		98,60	100,00	98,39	95,92
01.2.06 07	- Penyediaan Bahan/Material		-	-	-	-							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
01.2.06 09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30.000.000	60.000.000	105.000.000	84.700.000		29.525.000	59.516.558	103.034.452	148.855.106		98,42	99,19	98,13	175,74
01.2.06 10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		11.245.600	11.245.600	15.000.000	14.998.150		10.637.000	11.245.600	14.699.455	14.645.925		94,59	100,00	98,00	97,65
01.2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		346.900.000	376.860.536	410.424.068	339.260.000	-	324.518.082	340.731.079	394.568.125	362.998.657		93,55	90,41	96,14	107,00
01.2.08 01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.500.000	2.500.000	-	-		728.000	366.250	-			29,12	14,65	#DIV/0!	#DIV/0!



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
01.2.08 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		260.400.000	285.400.000	285.400.000	235.400.000		239.808.238	251.700.461	270.817.935	242.016.057		92,09	88,19	94,89	102,81
01.2.08 04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		84.000.000	88.960.536	125.024.068	103.860.000		83.981.844	88.664.368	123.750.190	120.982.600		99,98	99,67	98,98	116,49
Permendagri 13 Tahun 2006																
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	160.881.000					146.259.156					90,91				
02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00					-	-	-	-	-	#DIV/0!				
02 07	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	0,00					23.500.000	-	-	-	-	#DIV/0!				
02 10	Pengadaan meubelair	0,00					-	-	-	-	-	#DIV/0!				
02 11	Pengadaan komputer	20.000.000					17.250.000	-	-	-	-	86,25				
02 14	Pengadaan Instalasi listrik dan telepon	0,00					-	-	-	-	-	#DIV/0!				
02 22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	30.000.000					14.839.000	-	-	-	-	49,46				
02 23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	22.861.000					22.775.175	-	-	-	-	99,62				
02 24	Pemeliharaan rutin/ Berkala kendaraan Dinas/Operasional	28.020.000					27.964.081	-	-	-	-	99,80				
02 26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000					24.949.900	-	-	-	-	62,37				
02 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	20.000.000					14.981.000	-	-	-	-	74,91				
02 44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	0,00					-	-	-	-	-	#DIV/0!				
Permendagri 90 Tahun 2019																
01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		137.372.000	864.840.550	219.122.850	274.680.790	-	129.745.471	809.964.500	206.494.000	324.428.014		94,45	93,65	94,24	118,11
01.2.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.000.000	734.171.650	40.000.000	94.948.140	-	19.844.000	683.864.000	39.880.000	166.936.606		99,22	93,15	99,70	175,82
01.2.07 02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	-	49.950.000		-	-	-	49.181.606		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,46
01.2.07 06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-	-							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
01.2.07 10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.000.000	734.171.650	40.000.000			19.844.000	683.864.000	39.880.000	40.410.000		99,22	93,15	99,70	#DIV/0!
01.2.07 11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	44.998.140		-	-	-	77.345.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	171,88
01.2.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		117.372.000	130.668.900	179.122.850	179.732.650	-	109.901.471	126.100.500	166.614.000	157.491.408		93,64	96,50	93,02	87,63
01.2.09 01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		19.861.000	19.861.000	22.859.450	22.859.450		18.914.693	18.344.450	20.519.400	20.363.708		95,24	92,36	89,76	89,08
01.2.09 02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		41.020.000	55.990.900	49.995.400	62.379.200		38.242.278	53.790.250	45.137.700	56.097.700		93,23	96,07	90,28	89,93



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
01.2.09 09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		14.991.000	4.997.000	34.968.000	43.194.000		13.731.000	4.997.000	34.968.000	21.570.000		91,59	100,00	100,00	49,94
01.2.09 10	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		15.000.000	19.870.000	41.570.000	21.570.000		13.132.000	19.630.000	36.290.000	29.730.000		87,55	98,79	87,30	137,83
01.2.09 11	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		26.500.000	29.950.000	29.730.000	29.730.000		25.881.500	29.338.800	29.698.900	29.730.000		97,67	97,96	99,90	100,00

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat atau perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memiliki tugas melaksanakan Urusan di bidang Keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun kelompok sasaran layanan dari BPKAD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan seluruh pemangku kepentingan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Menyusunan anggaran, pencairan dana, verifikasi SPM, dan pelaporan keuangan	Perangkat Daerah (OPD/SKPD)
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan dan penatausahaan asset	Perangkat Daerah (OPD/SKPD)

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah:

Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inspektorat Daerah	Pengawasan internal	Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
2.	DPRD	Fungsi legislasi dan pengawasan	Memberikan masukan dalam tata kelola keuangan daerah
3.	BPK RI	Auditor eksternal	Memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan Menyampaikan rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan dan aset
4.	BPKP	Pembinaan teknis dan pengawasan	Pendampingan implementasi sistem keuangan daerah (seperti SAKIP, SIPD, dan lainnya)
5.	Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah)	Pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah	Memberikan regulasi dan pedoman teknis
6.	Kementerian Keuangan (DJPB, DJPK)	Transfer dana dan pelaporan keuangan	Sinkronisasi sistem pelaporan keuangan daerah ke pusat
7.	Kantor Pertanahan (BPN) dan Samsat	Pengamanan dan legalisasi aset	Sertifikasi tanah milik daerah dan Pengurusan BPKB/STNK kendaraan dinas
8.	Lembaga Keuangan dan Perbankan	Transaksi keuangan	Penyaluran gaji, belanja, dan penerimaan daerah

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Daerah.

Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
1.	Bank Balbar	1. Menyediakan system pembayaran digital (gaji, belanja, pajak daerah). 2. Mendukung pengelolaan kas dan treasury daerah. 3. Memberi kemudahan layanan keuangan bagi ASN dan mitra pemda.	Meningkatkan efisiensi pengelolaan kas dan mempercepat realisasi anggaran oleh BPKAD.

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

Tabel di atas mengilustrasikan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah secara lebih spesifik. Kontribusi yang diberikan oleh BUMD tidak hanya berupa penyediaan sumber daya atau dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk kemitraan yang

strategis untuk mewujudkan keberhasilan program-program daerah. Melalui kerjasama yang efektif dengan BUMD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat pencapaian target-target kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

Tabel 2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inspektorat Daerah	Pengawasan internal dan reviu	Memastikan kesesuaian pengelolaan keuangan kerja sama dengan prinsip akuntabilitas
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Kerja sama daerah dalam dokumen perencanaan (RKPD/Renja)	Memastikan keterkaitan rencana kerja sama dengan penganggaran dan pengelolaan aset
3.	Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPPRD)	Koordinasi Perencanaan dan Penetapan Target PAD	Menyusun data historis penerimaan 3-5 tahun terakhir

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan PD untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar

penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

**Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan aset daerah yang tidak tertib dan sistem pengendalian yang lemah	Terjadinya penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan aset dan anggaran daerah	- Ketidakteraturan dalam Pengelolaan aset daerah - Lemahnya sistem pengendalian internal (SPI) yang diterapkan
2.	Ketidakteraturan dalam pencatatan dan pengelolaan aset daerah	Sistem pencatatan dan pengelolaan aset yang lebih terstruktur dan transparan	- Pengelolaan aset yang tidak tertib - Ketidakjelasan status aset
3.	Ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi belanja	Anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi belanja	- Perubahan kebijakan. - ketidaktepatan perencanaan, atau - Ketidakmampuan dalam mengontrol pengeluaran

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam pengelolaan keuangan daerah karena

dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Mempawah dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketergantungan Tinggi terhadap Dana Transfer dari Pusat dikarenakan Sebagian besar pendapatan daerah masih sangat bergantung pada Dana Transfer Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan.
2. Perencanaan dan Penganggaran yang Belum Sinkron dikarenakan Masih ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dan penganggaran (APBD). Hal ini menyebabkan program/kegiatan tidak fokus pada pencapaian prioritas pembangunan daerah.
3. Pengelolaan Aset Daerah yang Belum Tertib dikarenakan Masih banyak aset daerah yang belum tercatat secara lengkap dan akurat, serta belum didayagunakan secara optimal. Hal ini berdampak pada opini BPK dan potensi kerugian negara/daerah.
4. Dinamisnya Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dikarenakan Perubahan regulasi yang cepat (misalnya dari Kemendagri, Kemenkeu, BPK) membuat daerah harus terus menyesuaikan diri, yang dapat menghambat pelaksanaan anggaran jika tidak direspons secara cepat dan tepat.

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan

masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Krisis Ekonomi Global dan Ketidakstabilan Geopolitik, Mengakibatkan fluktuasi harga komoditas, inflasi, dan ketidakpastian fiskal yang berdampak pada proyeksi pendapatan daerah sehingga mendorong daerah untuk lebih berhati-hati dalam perencanaan anggaran dan melakukan efisiensi belanja.
2. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs), sehingga daerah harus menyelaraskan pengelolaan keuangannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan) dan Menuntut integrasi indikator kinerja program daerah dengan indikator global.
3. Perkembangan Standar Akuntansi dan Audit Internasional, Standar internasional (IPSAS, INTOSAI) memengaruhi kebijakan dan sistem pelaporan keuangan di Indonesia, termasuk daerah sehingga menuntut harmonisasi sistem pelaporan keuangan daerah dengan praktik global

2.2.2.2 Isu Nasional

Isu nasional merupakan permasalahan, tantangan, atau agenda strategis yang terjadi di tingkat nasional dan berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun pemerintahan. Isu ini umumnya menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan seluruh lapisan masyarakat karena menyangkut kepentingan publik secara keseluruhan.

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai isu nasional yang berdampak langsung terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik di tingkat kabupaten dan kota, antara lain;

1. Ketergantungan Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat, Sebagian besar daerah masih sangat mengandalkan Dana Transfer Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan daerah belum memiliki

kapasitas fiskal yang cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Isu ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan PAD secara berkelanjutan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan lokal.

2. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), SIPD sebagai sistem terpadu untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan ditetapkan secara nasional. Namun, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi tantangan infrastruktur, SDM, serta proses migrasi data dari sistem lama. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengganggu proses penganggaran dan pelaporan keuangan daerah.
3. Masalah dalam Pengelolaan Aset Daerah, Masih banyak aset daerah yang belum tercatat atau belum dinilai secara wajar. Inventarisasi yang tidak akurat dan pemanfaatan aset yang belum optimal menyebabkan kerugian potensial serta memengaruhi opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Isu-isu nasional tersebut menuntut daerah untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan secara komprehensif, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan kapasitas fiskal, digitalisasi sistem keuangan, serta peningkatan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan berkelanjutan

2.2.2.3 Isu Regional

Di tingkat provinsi, pengelolaan keuangan daerah menghadapi tantangan khas yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kapasitas fiskal, dan struktur ekonomi wilayah. Salah satu isu utama adalah ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (seperti DAU dan DAK), terutama di provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Tantangan ini menghambat kemandirian fiskal dan daya tahan

anggaran terhadap perubahan kebijakan nasional. Selain itu, kesenjangan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota dalam satu provinsi menyebabkan ketimpangan pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Rendahnya serapan anggaran serta perencanaan dan penganggaran yang belum sinkron juga menjadi isu serius yang berdampak pada efektivitas program. Masalah lainnya adalah pengelolaan aset daerah yang belum tertib, keterbatasan SDM pengelola keuangan yang kompeten, serta kualitas pengawasan internal yang masih lemah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi strategis yang dapat diterapkan antara lain:

1. Peningkatan PAD melalui reformasi sistem pajak dan retribusi daerah, serta digitalisasi layanan pendapatan;
2. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, dengan integrasi sistem informasi keuangan daerah (misalnya SIPD);
3. Distribusi bantuan keuangan provinsi secara afirmatif kepada daerah dengan fiskal rendah untuk mendukung pemerataan pembangunan;
4. Penataan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal melalui sistem inventarisasi berbasis digital dan sertifikasi aset tetap;
5. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan keuangan daerah, sertifikasi bendahara, dan penguatan kompetensi ASN; serta
6. Penguatan pengawasan internal dan eksternal, termasuk pengendalian internal dan tindak lanjut hasil audit BPK.

Dengan pendekatan ini, provinsi dapat membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD



Kabupaten Mempawah dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Pelayanan Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Pengelolaan aset daerah yang tidak tertib dan sistem pengendalian yang lemah. 2. Ketidakteraturan dalam pencatatan dan pengelolaan aset daerah yang dapat mengganggu kestabilan keuangan daerah 3. Ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi belanja yang berdampak pada ketidakseimbangan fiskal.	1. Ketergantungan Tinggi terhadap pendapatan Dana Transfer dari Pusat yang menyebabkan daerah kurang mandiri dalam membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan 2. Perencanaan dan Penganggaran yang Belum Sinkron dikarenakan Masih ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dan penganggaran (APBD). Hal ini menyebabkan program/kegiatan tidak fokus pada pencapaian prioritas pembangunan daerah. 3. Pengelolaan Aset Daerah yang Belum Tertib dikarenakan Masih banyak aset daerah yang belum tercatat secara lengkap dan akurat, serta belum	1. Krisis Ekonomi Global dan Ketidakstabilan Geopolitik, Mengakibatkan fluktuasi harga komoditas, inflasi, dan ketidakpastian fiskal yang berdampak pada proyeksi pendapatan daerah sehingga mendorong daerah untuk lebih berhati-hati dalam perencanaan anggaran dan melakukan efisiensi belanja 2. Agenda SDGs, sehingga daerah harus menyelaraskan pengelolaan keuangannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan) dan Menuntut integrasi indikator kinerja	1. Ketergantungan Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat, Sebagian besar daerah masih sangat mengandalkan Dana Transfer Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan daerah belum memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Isu ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan PAD secara berkelanjutan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-	1. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (seperti DAU dan DAK), terutama di provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Tantangan ini menghambat kemandirian fiskal dan daya tahan anggaran terhadap perubahan kebijakan nasional. Selain itu, kesenjangan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota dalam satu provinsi menyebabkan ketimpangan pelayanan publik dan pembangunan wilayah. 2. Rendahnya serapan anggaran serta	Manajemen risiko dan tata kelola keuangan daerah



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		didayagunakan secara optimal. Hal ini berdampak pada opini BPK dan potensi kerugian negara/daerah. 4. Dinamisnya Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dikarenakan Perubahan regulasi yang cepat (misalnya dari Kemendagri, Kemenkeu, BPK) membuat daerah harus terus menyesuaikan diri, yang dapat menghambat pelaksanaan anggaran jika tidak direspons secara cepat dan tepat.	program daerah dengan indikator global. 3. Perkembangan Standar Akuntansi dan Audit Internasional, Standar internasional (IPSAS, INTOSAI) memengaruhi kebijakan dan sistem pelaporan keuangan di Indonesia, termasuk daerah sehingga menuntut harmonisasi sistem pelaporan keuangan daerah dengan praktik global	sumber pendapatan lokal. 2. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), SIPD sebagai sistem terpadu untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan ditetapkan secara nasional. Namun, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi tantangan infrastruktur, SDM, serta proses migrasi data dari sistem lama. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengganggu proses penganggaran dan pelaporan keuangan daerah 3. Masalah dalam Pengelolaan Aset Daerah, Masih banyak aset daerah yang belum tercatat atau belum dinilai secara wajar. Inventarisasi yang tidak akurat dan pemanfaatan aset yang belum optimal	perencanaan dan penganggaran yang belum sinkron juga menjadi isu serius yang berdampak pada efektivitas program. 3. Masalah lainnya adalah pengelolaan aset daerah yang belum tertib, keterbatasan SDM pengelola keuangan yang kompeten, serta kualitas pengawasan internal yang masih lemah.	



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
				menyebabkan kerugian potensial serta memengaruhi opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah		

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Perangkat Daerah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Perangkat Daerah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran,
Memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan rencana pembangunan daerah
2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal,
Meningkatkan sistem pengendalian internal untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
3. Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel,
Memastikan penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat
4. Penyelarasan Kebijakan Keuangan,
Menyelaraskan kebijakan keuangan daerah dengan kebijakan keuangan pusat dan kebijakan pembangunan daerah
5. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah,
Fokus pada pengelolaan aset daerah yang lebih baik, termasuk pemanfaatan aset, pengamanan aset, dan penghapusan aset yang sudah tidak sesuai kebutuhan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Mempawah dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tujuan ini secara

langsung mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia.

Misi 3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan Meningkatnya ketahanan daerah. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Indeks Ketahanan Daerah.

Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah berperan dalam mendukung misi ke-1, tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas”, dan sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas” dari RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

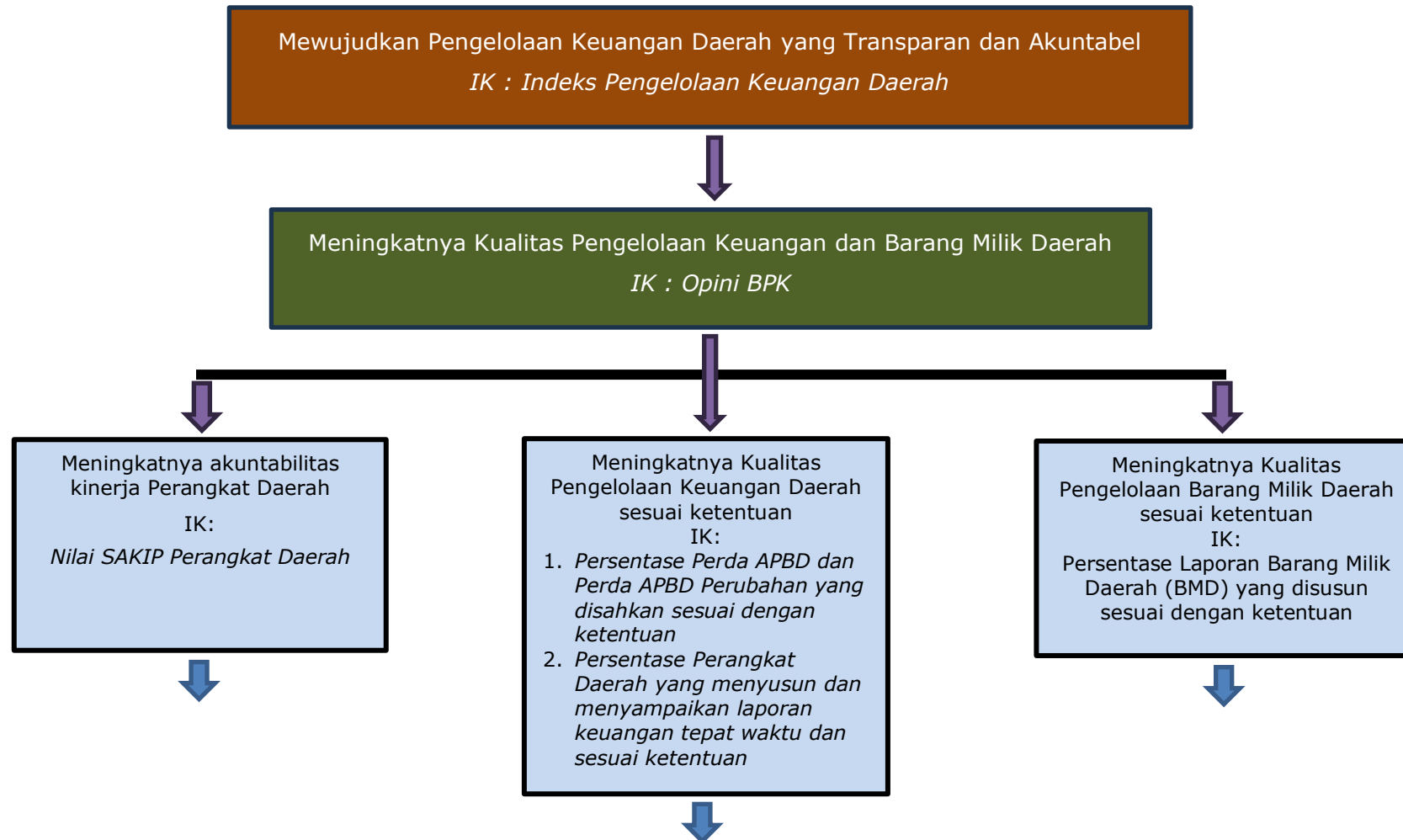
NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	75.58	75.95	76.33	76.72	77.10	77.48	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah



Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai pohon kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

**Gambar 3.2 Pohon Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2029**





Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah IK: <i>Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah</i>
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah IK: <i>Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan</i>
Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah IK: <i>Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah</i>
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah IK: <i>Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah IK: <i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</i>
Terlaksananya proses pengadaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku IK: <i>Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah IK: <i>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah IK: <i>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>



Meningkatnya kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah IK: <i>Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyusunan anggaran</i>
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah IK: <i>Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengelolaan perbendaharaan daerah</i>
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah IK: <i>1. persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyusunan laporan keuangan SKPD 2. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu</i>
Meningkatnya kualitas laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah IK: <i>Persentase laporan pengalokasian dana bantuan keuangan, darurat mendesak dan bagi hasil kab/kota</i>
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah IK: <i>Persentase laporan pengelolaan keuangan daerah yang diakomodir dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah</i>



Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan IK: <i>Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>





Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <i>IK: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS <i>IK: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	Tersedianya Standar Satuan Harga <i>IK:Jumlah standar satuan harga yang disusun</i>
Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD <i>IK: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS <i>IK: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah <i>IK:Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>
Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD <i>IK: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD</i>	Tersusunnya dokumen verifikasi RKA-SKPD <i>IK:Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah <i>IK:Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah</i>
Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD <i>IK: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD</i>	Tersusunnya dokumen verifikasi perubahan RKA-SKPD <i>IK:Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah <i>IK:Jumlah Kebijakan Pengelolaan barang milik daerah</i>
Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD <i>IK: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD</i>	Tersusunnya dokumen verifikasi DPA-SKPD <i>IK:Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah <i>IK:Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah</i>
Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <i>IK: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Tersusunnya dokumen verifikasi perubahan DPA-SKPD <i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah <i>IK: Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) barang milik daerah</i>
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN <i>IK: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Tersusunnya dokumen peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD <i>IK:Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah <i>IK:Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah</i>
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD <i>IK: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD <i>IK:Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah <i>IK:Jumlah laporan Hasil Penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD</i>
Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <i>IK: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran <i>IK:Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah <i>IK:Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD</i>
Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD <i>IK: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Tersedianya bahan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah <i>IK:Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah <i>IK:Jumlah Dokumen hasil optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD</i>
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD <i>IK: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD <i>IK:Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah <i>IK:Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD</i>
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya <i>IK: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah <i>IK:Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun</i>



	<i>IK:Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan <i>IK: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank <i>IK:Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota <i>IK:Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan BMD pemerintah kabupaten/kota</i>
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <i>IK: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) <i>IK:Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor <i>IK: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait <i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor <i>IK: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan <i>IK:Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan <i>IK: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota <i>IK:Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	
Tersedianya Bahan/Material <i>IK: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah <i>IK:Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	
Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <i>IK: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban <i>IK:Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>	



Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD <i>IK: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Tersedianya bahan koordinasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran <i>IK:Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <i>IK: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah <i>IK:Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya <i>IK: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Tersedianya bahan koordinasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota <i>IK:Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <i>IK: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Tersusunnya Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD <i>IK:Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <i>IK: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Tersusunnya dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD <i>IK:Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <i>IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah <i>IK:Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor <i>IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah <i>IK:Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <i>IK: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota <i>IK:Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <i>IK: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota <i>IK:Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <i>IK: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Tersedianya bahan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan <i>IK:Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>
Terlaksananya Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak



<i>IK: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>
Terlaksananya Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya <i>IK: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>

<i>IK:Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>
Terlaksananya pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota <i>IK:Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah <i>IK:Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah</i>

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang meliputi antara lain:

**Tabel 3.2 Penentuan Strategi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Pengelolaan aset daerah yang tidak tertib dan sistem pengendalian yang lemah	<i>Tujuan:</i> Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi. <i>Sasaran:</i> Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Melaksanakan pendataan ulang seluruh aset daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan menggunakan teknologi informasi
2	Ketidakteraturan dalam pencatatan dan pengelolaan aset daerah		
3	Ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi belanja		Menjamin keterpaduan antara RKPD, Renja OPD, KUA-PPAS, dan DPA agar tidak terjadi ketidaksesuaian

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Arah Kebijakan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
	<u>Keadilan</u> Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu dalam masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.	Menguatkan Fondasi Kabupaten Mempawah yang Cerdas dan Mandiri	Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	
		Percepatan Pembangunan untuk Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berkelanjutan		
		Bertumbuh dan Maju sebagai Daerah Terdepan		
		Memantapkan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya		
		Mewujudkan Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan		

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:



Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penetapan dan tahapan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah mengacu pada struktur dokumen yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang meliputi Pendahuluan, Gambaran Layanan, Permasalahan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggara n bidang urusan, dan Penutup. Proses ini melibatkan pengumpulan data primer dan tahapan-tahapan lainnya hingga penyusunan dokumen Renstra.				
<u>Prioritas:</u> Meningkatkan penunjang sarana dan prasarana serta kualitas SDM pada layanan pencairan dana dan	<u>Prioritas:</u> Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada layanan pencairan dana dan pendampingan penyusunan	<u>Prioritas:</u> Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pencairan dana dan pendampingan penyusunan	<u>Prioritas:</u> Meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan layanan pencairan dana dan pendampingan	<u>Prioritas:</u> ➢ Meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD ➢ Meningkatkan kualitas dan penerapan



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD	laporan keuangan SKPD	laporan keuangan SKPD	penyusunan laporan keuangan SKPD	kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
<u>Langkah:</u> Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM, pemenuhan dan modernisasi sarana prasarana, penguatan sistem manajemen dan penerapan teknologi serta melibatkan masyarakat dan kemitraan	<u>Langkah:</u> Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan peningkatan infrastruktur fisik, optimalisasi pengelolaan sistem keuangan, serta dukungan regulasi pendanaan dan kolaborasi lintas sektor	<u>Langkah:</u> Peningkatan infrastruktur dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia inovasi layanan digitalisasi sistem keuangan serta penguatan kemitraan dan keterlibatan masyarakat	<u>Langkah:</u> Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, pengembangan sistem manajemen yang efektif, perbaikan sarana dan prasarana serta penguatan peran dan dukungan lintas sektor	<u>Langkah:</u> ➤ Peningkatan kualitas laporan keuangan SKPD ➤ Peningkatan SDM dan sarpra, penguatan sistem menajemen keuangan dan kemitraan serta penerapan teknologi informasi dan inovasi

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

Lokus pelayanan BPKAD dalam penyelesaian masalah di SKPD mencakup wilayah tanggung jawab teknis dan koordinatif yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD berperan sebagai fasilitator utama dalam memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan SKPD berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, BPKAD memberikan asistensi teknis, supervisi, serta melakukan reviu terhadap dokumen-dokumen anggaran dan keuangan yang disusun oleh SKPD, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5 Lokus Permasalahan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Masalah	Tindak lanjut Penyelesaian Masalah	Keterangan
<i>Bidang Penganggaran dan Penatausahaan:</i> 1. SKPD sering terlambat menyampaikan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) atau usulan anggaran, sehingga	1. BPKAD perlu menyusun kalender penganggaran yang rinci dan disepakati bersama, mulai dari tahapan	



Masalah	Tindak lanjut Penyelesaian Masalah	Keterangan
menghambat proses penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD oleh BPKAD 2. Adanya revisi atau terbitnya regulasi baru (misal Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD) di tengah tahun menyebabkan perubahan teknis yang harus disesuaikan cepat oleh SKPD dan difasilitasi oleh BPKAD 3. Kendala teknis pada aplikasi keuangan digunakan oleh BPKAD dan SKPD	awal sampai finalisasi RAPBD serta dapat melakukan bimtek rutin bagi pejabat perencana dan keuangan di SKPD 2. Segera setelah regulasi baru diterbitkan, BPKAD mengadakan sosialisasi atau forum komunikasi (secara langsung atau daring) kepada seluruh SKPD. 3. Jika aplikasi berasal dari pusat BPKAD harus menjalin komunikasi aktif dengan pengelola pusat untuk melaporkan bug, meminta update, atau konsultasi teknis	
<i>Bidang Akuntansi:</i> 1. Masih banyak laporan keuangan SKPD yang mengandung kesalahan pencatatan, saldo tidak wajar, atau tidak sinkron dengan dokumen pendukung. 2. SKPD tidak rutin melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan BPKAD atau antar unit kerja dalam satu SKPD.	1. BPKAD perlu menjadwalkan rekonsiliasi bulanan atau triwulanan dengan seluruh SKPD untuk mencocokkan data antara laporan keuangan, dokumen pendukung, dan sistem aplikasi keuangan. 2. SKPD yang tidak melaksanakan rekonsiliasi sesuai jadwal diberikan teguran tertulis, dan dalam kasus berulang bisa diberi sanksi berupa penundaan verifikasi belanja atau penangguhan pencairan anggaran tertentu	



Masalah	Tindak lanjut Penyelesaian Masalah	Keterangan
<i>Bidang Aset:</i> 1. Banyak aset di SKPD belum tercatat dengan lengkap atau valid, baik dari sisi nilai, lokasi, maupun status kepemilikan. 2. Inventarisasi aset secara menyeluruh sering tertunda karena keterbatasan waktu, sumber daya, atau kurangnya komitmen dari SKPD.	 1. BPKAD menyediakan formulir atau aplikasi pendataan aset yang mencakup elemen wajib seperti kode barang, lokasi, status hukum, kondisi fisik, dan nilai 2. BPKAD perlu menetapkan jadwal resmi inventarisasi aset dalam bentuk Surat Edaran atau Keputusan Kepala Daerah yang memuat tenggat waktu, tahapan kegiatan, dan pembagian tanggung jawab	

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab IV (Empat) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.



Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas							
	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah			Opini BPK		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan		Persentase Perda APBD dan Perda APBD Perubahan yang disahkan sesuai dengan ketentuan	Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyusunan anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengelolaan perbendaharaan daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyusunan laporan keuangan SKPD 2. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Tersedianya bahan koordinasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan pengalokasian dana bantuan keuangan, darurat mendesak dan bagi hasil kab/kota	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase laporan pengelolaan keuangan daerah yang diakomodir dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
					Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun sesuai dengan ketentuan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah standar satuan harga yang disusun	Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) barang milik daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
					Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Jumlah laporan Hasil Penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	Penilaian Barang Milik Daerah	
					Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen hasil optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
					Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan BMD pemerintah kabupaten/kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Bangunan Kantor yang Disediakan		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya proses pengadaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah



Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				157.458.787.625,00		182.444.297.734,00		209.025.240.308,00		239.922.428.563,00		275.119.283.861,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.754.892.555,00		8.346.102.540,00		9.617.219.796,00		11.250.205.265,00		12.586.948.554,00		
Meningkatnya kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	70.00	71.00	6.754.892.555,00	71.50	8.346.102.540,00	72.00	9.617.219.796,00	72.50	11.250.205.265,00	73.00	12.586.948.554,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.998.500,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2.999.800,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.999.800,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	14.999.500,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	3.999.700,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	3.999.700,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.999.800,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.999.800,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.999.700,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	3.999.700,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.999.800,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2.999.800,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.999.700,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	3.999.700,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14.999.500,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	14.999.500,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.053.679.855,00		6.668.655.040,00		7.654.253.296,00		8.787.691.290,00		10.091.144.983,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	56.419.600,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	27.499.600,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	7.499.600,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	49	5.962.261.055,00	54	6.570.655.040,00	54	7.556.253.296,00	54	8.689.691.290,00	54	9.993.144.983,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.962.261.055,00		6.570.655.040,00		7.556.253.296,00		8.689.691.290,00		9.993.144.983,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	49	5.962.261.055,00	54	6.570.655.040,00	54	7.556.253.296,00	54	8.689.691.290,00	54	9.993.144.983,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				56.419.600,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	56.419.600,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				27.499.600,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	27.499.600,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.499.600,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	1	7.499.600,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.900.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	20.900.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.900.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	20.900.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000,00		88.750.000,00		102.000.000,00		118.000.000,00		135.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	25.000.000,00	10	28.750.000,00	10	33.000.000,00	10	38.000.000,00	10	43.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49	54	-	54	60.000.000,00	54	69.000.000,00	54	80.000.000,00	54	92.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		60.000.000,00		69.000.000,00		80.000.000,00		92.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49	54	-	54	60.000.000,00	54	69.000.000,00	54	80.000.000,00	54	92.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		28.750.000,00		33.000.000,00		38.000.000,00		43.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	25.000.000,00	10	28.750.000,00	10	33.000.000,00	10	38.000.000,00	10	43.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				248.074.750,00		283.500.000,00		321.000.000,00		364.000.000,00		414.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	34.999.400,00	1	41.000.000,00	1	47.000.000,00	1	54.000.000,00	1	62.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			-		-							5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	59.250.000,00	1	69.000.000,00	1	78.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	75.000.000,00	10	87.000.000,00	10	100.000.000,00	10	115.000.000,00	10	132.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4500	4500	14.998.150,00	4500	17.500.000,00	4500	20.000.000,00	4500	23.000.000,00	4500	27.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	36.000.000,00	1	36.000.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	27.827.200,00	1	33.000.000,00	1	37.000.000,00	1	42.000.000,00	1	48.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.827.200,00		33.000.000,00		37.000.000,00		42.000.000,00		48.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	27.827.200,00	1	33.000.000,00	1	37.000.000,00	1	42.000.000,00	1	48.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.250.000,00		69.000.000,00		78.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	59.250.000,00	1	69.000.000,00	1	78.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.000.000,00		36.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	36.000.000,00	1	36.000.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				34.999.400,00		41.000.000,00		47.000.000,00		54.000.000,00		62.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	34.999.400,00	1	41.000.000,00	1	47.000.000,00	1	54.000.000,00	1	62.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		87.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		132.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	75.000.000,00	10	87.000.000,00	10	100.000.000,00	10	115.000.000,00	10	132.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				14.998.150,00		17.500.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		27.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4500	4500	14.998.150,00	4500	17.500.000,00	4500	20.000.000,00	4500	23.000.000,00	4500	27.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		701.000.000,00		856.000.000,00		1.205.000.000,00		1.069.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya proses pengadaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2		-	2	70.000.000,00	3	120.000.000,00	1	350.000.000,00	2	80.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	123	620.000.000,00	125	712.000.000,00	125	818.000.000,00	125	941.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	1	11.000.000,00	2	24.000.000,00	3	37.000.000,00	4	48.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		70.000.000,00		120.000.000,00		350.000.000,00		80.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2		-	2	70.000.000,00	3	120.000.000,00	1	350.000.000,00	2	80.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		11.000.000,00		24.000.000,00		37.000.000,00		48.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	1	11.000.000,00	2	24.000.000,00	3	37.000.000,00	4	48.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		620.000.000,00		712.000.000,00		818.000.000,00		941.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	123	620.000.000,00	125	712.000.000,00	125	818.000.000,00	125	941.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.400.000,00		270.710.000,00		311.316.500,00		358.013.975,00		411.716.071,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	235.400.000,00	36	270.710.000,00	36	311.316.500,00	36	358.013.975,00	36	411.716.071,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					235.400.000,00		270.710.000,00		311.316.500,00		358.013.975,00		411.716.071,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	235.400.000,00	36	270.710.000,00	36	311.316.500,00	36	358.013.975,00	36	411.716.071,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.839.450,00		253.487.500,00		292.650.000,00		337.500.000,00		386.087.500,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	30	29.730.000,00	30	34.200.000,00	30	39.500.000,00	30	45.250.000,00	30	52.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	5.000.000,00	1	100.000.000,00	1	115.000.000,00	1	132.250.000,00	1	152.087.500,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	22	62.000.000,00	22	71.300.000,00	22	82.000.000,00	22	95.000.000,00	22	110.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	22.859.450,00	1	27.000.000,00	1	32.000.000,00	1	37.000.000,00	1	40.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53	53	18.250.000,00	53	20.987.500,00	53	24.150.000,00	53	28.000.000,00	53	32.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.859.450,00		27.000.000,00		32.000.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	22.859.450,00	1	27.000.000,00	1	32.000.000,00	1	37.000.000,00	1	40.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.000.000,00		71.300.000,00		82.000.000,00		95.000.000,00		110.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	22	62.000.000,00	22	71.300.000,00	22	82.000.000,00	22	95.000.000,00	22	110.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		132.250.000,00		152.087.500,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	5.000.000,00	1	100.000.000,00	1	115.000.000,00	1	132.250.000,00	1	152.087.500,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.250.000,00		20.987.500,00		24.150.000,00		28.000.000,00		32.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53	53	18.250.000,00	53	20.987.500,00	53	24.150.000,00	53	28.000.000,00	53	32.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.730.000,00		34.200.000,00		39.500.000,00		45.250.000,00		52.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	30	29.730.000,00	30	34.200.000,00	30	39.500.000,00	30	45.250.000,00	30	52.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				149.576.267.320,00		171.895.419.694,00		197.405.345.012,00		226.585.743.798,00		260.406.059.807,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persentase Perda APBD dan Perda APBD Perubahan yang disahkan sesuai ketentuan	100	100	149.576.267.320,00	100	171.895.419.694,00	100	197.405.345.012,00	100	226.585.743.798,00	100	260.406.059.807,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.589.178.000,00		1.628.907.449,00		1.669.630.131,00		1.711.370.885,00		1.754.155.157,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatnya kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31	32	31.706.100,00	32	32.498.752,00	32	33.311.221,00	32	34.144.001,00	32	34.997.601,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	375.228.200,00	2	384.608.905,00	2	394.224.127,00	2	404.079.730,00	2	414.181.724,00	5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	528.191.800,00	2	541.396.595,00	2	554.931.509,00	2	568.804.797,00	2	583.024.917,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	32	79.223.800,00	32	81.204.395,00	32	83.234.504,00	32	85.315.367,00	32	87.448.251,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	32	54.830.400,00	32	56.201.160,00	32	57.606.189,00	32	59.046.343,00	32	60.522.502,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	32	102.378.400,00	32	104.937.860,00	32	107.561.306,00	32	110.250.339,00	32	113.006.597,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	151.806.200,00	2	155.601.355,00	2	159.491.388,00	2	163.478.673,00	2	167.565.640,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	108.439.100,00	2	111.150.077,00	2	113.928.829,00	2	116.777.050,00	2	119.696.476,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	4	157.374.000,00	4	161.308.350,00	4	165.341.058,00	4	169.474.585,00	4	173.711.449,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				151.806.200,00		155.601.355,00		159.491.388,00		163.478.673,00		167.565.640,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	151.806.200,00	2	155.601.355,00	2	159.491.388,00	2	163.478.673,00	2	167.565.640,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				108.439.100,00		111.150.077,00		113.928.829,00		116.777.050,00		119.696.476,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	108.439.100,00	2	111.150.077,00	2	113.928.829,00	2	116.777.050,00	2	119.696.476,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				102.378.400,00		104.937.860,00		107.561.306,00		110.250.339,00		113.006.597,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	32	102.378.400,00	32	104.937.860,00	32	107.561.306,00	32	110.250.339,00	32	113.006.597,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				54.830.400,00		56.201.160,00		57.606.189,00		59.046.343,00		60.522.502,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	32	54.830.400,00	32	56.201.160,00	32	57.606.189,00	32	59.046.343,00	32	60.522.502,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				31.706.100,00		32.498.752,00		33.311.221,00		34.144.001,00		34.997.601,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31	32	31.706.100,00	32	32.498.752,00	32	33.311.221,00	32	34.144.001,00	32	34.997.601,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				79.223.800,00		81.204.395,00		83.234.504,00		85.315.367,00		87.448.251,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	32	79.223.800,00	32	81.204.395,00	32	83.234.504,00	32	85.315.367,00	32	87.448.251,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				375.228.200,00		384.608.905,00		394.224.127,00		404.079.730,00		414.181.724,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	375.228.200,00	2	384.608.905,00	2	394.224.127,00	2	404.079.730,00	2	414.181.724,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				528.191.800,00		541.396.595,00		554.931.509,00		568.804.797,00		583.024.917,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	151.806.200,00	2	155.601.355,00	2	159.491.388,00	2	163.478.673,00	2	167.565.640,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				108.439.100,00		111.150.077,00		113.928.829,00		116.777.050,00		119.696.476,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	108.439.100,00	2	111.150.077,00	2	113.928.829,00	2	116.777.050,00	2	119.696.476,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				102.378.400,00		104.937.860,00		107.561.306,00		110.250.339,00		113.006.597,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	32	102.378.400,00	32	104.937.860,00	32	107.561.306,00	32	110.250.339,00	32	113.006.597,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				54.830.400,00		56.201.160,00		57.606.189,00		59.046.343,00		60.522.502,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	32	54.830.400,00	32	56.201.160,00	32	57.606.189,00	32	59.046.343,00	32	60.522.502,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				31.706.100,00		32.498.752,00		33.311.221,00		34.144.001,00		34.997.601,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31	32	31.706.100,00	32	32.498.752,00	32	33.311.221,00	32	34.144.001,00	32	34.997.601,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				79.223.800,00		81.204.395,00		83.234.504,00		85.315.367,00		87.448.251,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	32	79.223.800,00	32	81.204.395,00	32	83.234.504,00	32	85.315.367,00	32	87.448.251,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				375.228.200,00		384.608.905,00		394.224.127,00		404.079.730,00		414.181.724,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	375.228.200,00	2	384.608.905,00	2	394.224.127,00	2	404.079.730,00	2	414.181.724,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				528.191.800,00		541.396.595,00		554.931.509,00		568.804.797,00		583.024.917,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	528.191.800,00	2	541.396.595,00	2	554.931.509,00	2	568.804.797,00	2	583.024.917,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				157.374.000,00		161.308.350,00		165.341.058,00		169.474.585,00		173.711.449,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	4	157.374.000,00	4	161.308.350,00	4	165.341.058,00	4	169.474.585,00	4	173.711.449,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				492.850.000,00		645.000.000,00		685.000.000,00		685.000.000,00		685.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	12	14.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	860	860	16.000.000,00	890	20.000.000,00	890	20.000.000,00	890	20.000.000,00	890	20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	12	227.400.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2	2	110.000.000,00	4	130.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	31	31	16.800.000,00	33	20.000.000,00	33	20.000.000,00	33	20.000.000,00	33	20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20	20	15.000.000,00	35	20.000.000,00	35	20.000.000,00	35	20.000.000,00	35	20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264	264	15.000.000,00	280	25.000.000,00	280	25.000.000,00	280	25.000.000,00	280	25.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7	7	78.650.000,00	10	90.000.000,00	10	110.000.000,00	10	110.000.000,00	10	110.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264	264	15.000.000,00	280	25.000.000,00	280	25.000.000,00	280	25.000.000,00	280	25.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				16.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	860	860	16.000.000,00	890	20.000.000,00	890	20.000.000,00	890	20.000.000,00	890	20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				78.650.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7	7	78.650.000,00	10	90.000.000,00	10	110.000.000,00	10	110.000.000,00	10	110.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				14.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	12	14.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				110.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2	2	110.000.000,00	4	130.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				227.400.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	12	227.400.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20	20	15.000.000,00	35	20.000.000,00	35	20.000.000,00	35	20.000.000,00	35	20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				16.800.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	31	31	16.800.000,00	33	20.000.000,00	33	20.000.000,00	33	20.000.000,00	33	20.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				674.965.000,00		897.619.025,00		1.017.261.878,00		1.149.926.160,00		1.300.565.084,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	4	180.000.000,00	4	225.000.000,00	4	252.000.000,00	4	279.000.000,00	4	306.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31	31	29.999.300,00	31	40.000.000,00	31	46.000.000,00	31	52.900.000,00	31	60.835.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1	1	39.963.200,00	1	50.000.000,00	1	58.000.000,00	1	66.700.000,00	1	76.705.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	2	249.899.000,00	2	289.000.000,00	2	332.350.000,00	2	382.202.500,00	2	439.532.875,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	372	372	15.000.000,00	372	25.000.000,00	372	27.500.000,00	372	30.000.000,00	372	35.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	124	15	160.103.500,00	15	184.119.025,00	15	211.736.878,00	15	243.497.410,00	15	280.022.022,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			-	15	34.500.000,00	15	39.675.000,00	15	45.626.250,00	15	52.470.187,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				15.000.000,00		25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	372	372	15.000.000,00	372	25.000.000,00	372	27.500.000,00	372	30.000.000,00	372	35.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				160.103.500,00		184.119.025,00		211.736.878,00		243.497.410,00		280.022.022,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	124	15	160.103.500,00	15	184.119.025,00	15	211.736.878,00	15	243.497.410,00	15	280.022.022,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				39.963.200,00		50.000.000,00		58.000.000,00		66.700.000,00		76.705.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1	1	39.963.200,00	1	50.000.000,00	1	58.000.000,00	1	66.700.000,00	1	76.705.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				249.899.000,00		289.000.000,00		332.350.000,00		382.202.500,00		439.532.875,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	2	249.899.000,00	2	289.000.000,00	2	332.350.000,00	2	382.202.500,00	2	439.532.875,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				180.000.000,00		225.000.000,00		252.000.000,00		279.000.000,00		306.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	4	180.000.000,00	4	225.000.000,00	4	252.000.000,00	4	279.000.000,00	4	306.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			-		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				-				-			-		5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			-			-		-		-		5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				29.999.300,00		40.000.000,00		46.000.000,00		52.900.000,00		60.835.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31	31	29.999.300,00	31	40.000.000,00	31	46.000.000,00	31	52.900.000,00	31	60.835.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				-		34.500.000,00		39.675.000,00		45.626.250,00		52.470.187,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			-	15	34.500.000,00	15	39.675.000,00	15	45.626.250,00	15	52.470.187,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				146.402.446.320,00		168.397.065.220,00		193.706.625.003,00		222.712.618.753,00		256.339.511.566,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatnya kualitas laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	1	127.127.882.800,00	1	146.197.065.220,00	1	168.126.625.003,00	1	193.345.618.753,00	1	222.347.461.566,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	8.000.000.000,00	1	9.200.000.000,00	1	10.580.000.000,00	1	12.167.000.000,00	1	13.992.050.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	1	11.274.563.520,00	1	13.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	17.200.000.000,00	1	20.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				127.127.882.800,00		146.197.065.220,00		168.126.625.003,00		193.345.618.753,00		222.347.461.566,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	1	127.127.882.800,00	1	146.197.065.220,00	1	168.126.625.003,00	1	193.345.618.753,00	1	222.347.461.566,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				8.000.000.000,00		9.200.000.000,00		10.580.000.000,00		12.167.000.000,00		13.992.050.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	8.000.000.000,00	1	9.200.000.000,00	1	10.580.000.000,00	1	12.167.000.000,00	1	13.992.050.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				11.274.563.520,00		13.000.000.000,00		15.000.000.000,00		17.200.000.000,00		20.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	1	11.274.563.520,00	1	13.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	17.200.000.000,00	1	20.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				416.828.000,00		326.828.000,00		326.828.000,00		326.828.000,00		326.828.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	1	416.828.000,00	1	326.828.000,00	1	326.828.000,00	1	326.828.000,00	1	326.828.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				416.828.000,00		326.828.000,00		326.828.000,00		326.828.000,00		326.828.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	1	416.828.000,00	1	326.828.000,00	1	326.828.000,00	1	326.828.000,00	1	326.828.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.127.627.750,00		2.202.775.500,00		2.002.675.500,00		2.086.479.500,00		2.126.275.500,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan	100	100	1.127.627.750,00	100	2.202.775.500,00	100	2.002.675.500,00	100	2.086.479.500,00	100	2.126.275.500,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.127.627.750,00		2.202.775.500,00		2.002.675.500,00		2.086.479.500,00		2.126.275.500,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	-	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	11	90.000.000,00	12	105.000.000,00	13	115.000.000,00	14	120.000.000,00	15	125.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	-	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	1	76.508.500,00	1	89.508.500,00	1	94.508.500,00	1	99.508.500,00	1	104.508.500,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0	0	-	2	350.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	3	138.943.100,00	3	159.000.000,00	3	183.900.000,00	3	210.704.000,00	3	235.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	3	104.279.150,00	3	125.000.000,00	5	135.000.000,00	7	145.000.000,00	8	150.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	2	100.321.800,00	2	114.461.800,00	2	114.461.800,00	2	121.461.800,00	2	121.461.800,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	346.453.200,00	1	408.683.200,00	1	408.683.200,00	1	408.683.200,00	1	408.683.200,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	5	30.762.600,00	5	35.762.600,00	5	35.762.600,00	5	40.762.600,00	5	40.762.600,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	0	0	-	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	240.359.400,00	1	265.359.400,00	1	265.359.400,00	1	290.359.400,00	1	290.359.400,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				240.359.400,00		265.359.400,00		265.359.400,00		290.359.400,00		290.359.400,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	240.359.400,00	1	265.359.400,00	1	265.359.400,00	1	290.359.400,00	1	290.359.400,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				-		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	0	0	-	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				30.762.600,00		35.762.600,00		35.762.600,00		40.762.600,00		40.762.600,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	5	30.762.600,00	5	35.762.600,00	5	35.762.600,00	5	40.762.600,00	5	40.762.600,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	-	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				346.453.200,00		408.683.200,00		408.683.200,00		408.683.200,00		408.683.200,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	346.453.200,00	1	408.683.200,00	1	408.683.200,00	1	408.683.200,00	1	408.683.200,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				-		350.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0	0	-	2	350.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				138.943.100,00		159.000.000,00		183.900.000,00		210.704.000,00		235.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	3	138.943.100,00	3	159.000.000,00	3	183.900.000,00	3	210.704.000,00	3	235.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				104.279.150,00		125.000.000,00		135.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	3	104.279.150,00	3	125.000.000,00	5	135.000.000,00	7	145.000.000,00	8	150.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				90.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	11	90.000.000,00	12	105.000.000,00	13	115.000.000,00	14	120.000.000,00	15	125.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				100.321.800,00		114.461.800,00		114.461.800,00		121.461.800,00		121.461.800,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	2	100.321.800,00	2	114.461.800,00	2	114.461.800,00	2	121.461.800,00	2	121.461.800,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				76.508.500,00		89.508.500,00		94.508.500,00		99.508.500,00		104.508.500,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	1	76.508.500,00	1	89.508.500,00	1	94.508.500,00	1	99.508.500,00	1	104.508.500,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				-		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	-	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Tercapainya peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1.4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			2.1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.1. Penyusunan Standar Harga 3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah	

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	74,83 (2023)	75,58	75,95	76,33	76,72	77,10	77,48	SK. Kemendagri ttg Hasil IPKD Th. 2023
2.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	LHP BPK atas LKD Tahun 2024
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,09	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	Hasil reviu Itda atas LAKIT OPD Tahun 2024

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Permendagri 18 Tahun 2020 :										
1.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	10,87	12,87	14,87	16,87	18,87	20,87	22,87	
2.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	62,19	63,19	64,19	65,19	66,19	67,19	68,19	
3.	Opini Laporan keuangan	Laporan	10	10	10	10	10	10	10	
4.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,85	6,85	8,85	10,85	12,85	14,85	16,85	
5.	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	
6.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,19	8,47	7,97	7,47	6,97	6,47	5,97	
Renstra Pemerintah Kab. Mempawah										
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: BPKAD Kab. Mempawah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Mempawah

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Mempawah periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.